

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Konsep Pengawasan**

###### **a. Pengertian Pengawasan**

Konsep pengawasan dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai perbuatan untuk melihat dan memonitor terhadap orang agar ia berbuat sesuai dengan kehendak yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan dalam ilmu manajemen, pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang merupakan faktor penentu bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Sistem pengawasan yang baik sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan, baik dalam organisasi pemerintah maupun swasta. (Irawati B, 2020)

Menurut S. P. Siagian (2003: 116) mengemukakan bahwa definisi pengawasan adalah, "Sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya".

Menurut Ni"matul Huda (2007:33) mengemukakan bahwa pengawasan adalah, "Sebuah tindakan yang pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada suatu lembaga baik pemerintah atau swasta yang berwenang melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan atau kinerja kerja".

Menurut Menurut S. P Hasibuan (2002:64) mengemukakan bahwa pengawasan adalah, “Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan, sehingga tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.

#### **b. Karakteristik Pengawasan**

Menurut Siswanto (2009 : 149) mengemukakan secara umum terdapat sembilan karakteristik pengawasan atau pengendalian yang efektif, yaitu:

- 1) Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehensive*)
- 2) Tepat Waktu (*Timely*)
- 3) Akurat (*Accurate*)
- 4) Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*)
- 5) Secara Organisasi Realistik (*Organizationally Realistic*)
- 6) Fleksibel (*Flexible*)
- 7) Terpusat (*Centered*)
- 8) Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja (*Coordinated With Workflow*)
- 9) Preskriptif Dan Operasional (*Prescriptive And Operational*)

Adapun penjelasan dari karaktersitik-karakteristik Pengawasan diatas adalah sebagai berikut:

1) Objektif dan Komprehensif (*Objektive and Comprehesible*)

Informasi dalam suatu sistem pengendalian harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Sistem informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan bias yang tidak perlu dan kebingungan atau frustasi diantara para karyawan.

2) Tepat Waktu (*Timely*)

Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan.

3) Akurat (*Akurate*)

Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu sistem pengendalian dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau menciptakan permasalahan baru.

4) Secara ekonomi realistik (*Economically Realistic*)

Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekan seminimum mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan bias paling mimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuan.

5) Secara Organisasi Realistik (*Organizationally Realistic*)

Sistem pengendalian harus dapat digabungkan dengan realistis organisasi. Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian. Selain itu, semua standar untuk kinerja harus realistic. Perbedaan status diantara individu harus di hargai juga.

6) Terpusat (*Centered*)

Dipusatkan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi atau yang akan menimbulkan kerugian yang paling besar.

7) Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja (*Coordinated With Workflow*)

Informasi pengawasan harus dikordinasikan dengan arus pekerjaan diseluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengawasan harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya.

8) Preskriptif Dan Operasional (*Prescriptive And Operational*)

Mampu mengidentifikasi setelah terjadi deviasi dari standar, dalam hal ini terkait sebuah pengambilan tindakan perbaikan.

9) Fleksibel (*Flexible*)

Sistem pengendalian yang efektif harus dapat mengikuti perkembangan yang sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.

### c. Jenis-Jenis Pengawasan

Dalam suatu negara yang sedang berkembang atau membangun, maka kontrol atau pengawasan itu sangat penting baik pengawasan secara eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan jenis - jenis pengawasan berdasarkan berbagai hal, yakni:

Menurut Viktor Situmorang dan Jusuf Juhir (1993 : 26-27)

mengemukakan bahwa jenis-jenis pengawasan adalah:

- 1) Pengawasan *preventif* adalah pengawasan yang dilakukan melalui proses *pra audit*, sebelum pekerjaan dimulai.
- 2) Pengawasan *represif* adalah pengawasan yang dilakukan melalui *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi).
- 3) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana, hal ini dilakukan dengan inspeksi.
- 4) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksanaan baik lisan maupun tertulis, dan mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan *on the spot* atau secara berulang.

Menurut Sujamto (1986 : 81-82) mengemukakan bahwa jenis-jenis

pengawasan adalah:

- 1) Pengawasan eksternal atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi.
- 2) Pengawasan internal atau pengawasan dari dalam, ialah yang dilakukan oleh suatu badan/lembaga pengawas terhadap organ-organ dalam tubuh suatu organisasi.

Menurut T. Hani Handoko (2003 : 361) mengemukakan bahwa jenis-jenis pengawasan adalah:

- 1) Pengawasan pendahuluan atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari suatu standar atau tujuan serta memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- 2) Pengawasan *concurrent* adalah pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Pengawasan umpan balik atau dikenal sebagai *past – action controls* adalah pengawasan yang bertujuan untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Berdasarkan beberapa pendapat terkait jenis-jenis pengawasan yang telah dijabarkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya jenis dari pengawasan yang ada, namun hasil akhir yang dicapai tetap pada satu tujuan yakni agar mengetahui jalannya pekerjaan, memperbaiki kesalahan dan memantau agar program sesuai rencana.

## **2. Pengelolaan (Manajemen)**

### **a. Pengertian Pengelolaan (Manajemen)**

Pengelolaan menurut Djamarah (2006 :174) sama artinya dengan manajemen, istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen. "Manajemen adalah kata aslinya dari bahasa Inggris, yaitu *management* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan". Dapat dikatakan bahwa pengelolaan atau manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu juga, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* berasal dari kata *manage* menurut kamus oxford yang artinya memimpin atau membuat keputusan di dalam suatu organisasi. Istilah manajemen yang diterjemahkan dari kata *manage* memang biasanya dikaitkan dengan suatu tindakan yang mengatur sekelompok orang di dalam organisasi atau lembaga tertentu demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan.

Manullang (2006: 5) mengemukakan manajemen sebagai sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan manajemen menurut Hasibuan (Torang, 2013: 165) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Selain itu, Terry (Sukarna, 2011: 3), menyatakan bahwa manajemen adalah sebagai berikut, "*Management is the accomplishing of a predetermined objectives through the efforts of other people*" atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.

Menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44) manajemen adalah, "Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan".

Terkait dengan proses pelaksanaan manajemen, Fattah (2004: 1) mengemukakan bahwa:

"Dalam proses manajemen terlihat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pemimpinan (*Leading*), dan Pengawasan (*Controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien".

Berdasarkan pendapat tentang definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.



## b. Fungsi-fungsi Manajemen

Terry (Sukarna, 2011: 10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC.

### 1) *Planning* (Perencanaan)

Terry (Sukarna, 2011: 10) mengemukakan tentang *Planning* yaitu, "*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to accieve desired result*".

### 2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Terry (Sukarna, 2011: 38) mengemukakan tentang *organizing* sebagai berikut, "*Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary forthe attainment of the objectives, the assigning of the people to thesen activities, the providing of suitable physical factors of enviroment and the indicating of the relative authority delegated to each respectives activity*".

### 3) *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan)

Terry (Sukarna, 2011: 82) mengemukakan tentang *Actuating* yaitu, "*Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts*".

#### 4) *Controlling* (Pengawasan)

Terry (Sukarna, 2011: 110) mengemukakan bahwa *Controlling*, yaitu:

*“Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard”.*

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dasar manajemen yang diawali dengan proses perencanaan, artinya memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dilanjutkan dengan proses pengorganisasian dengan tujuan penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian melangkah pada tahap pelaksanaan yang merupakan proses membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Dan diakhiri dengan proses pengawasan yang juga dapat disebut sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard*, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* (ukuran).

### **3. Keuangan Daerah**

Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian harus diisi oleh orang yang tepat. Begitu juga pada bagian keuangan yang harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam memahami ilmu-ilmu keuangan. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang berkesempatan mengisi posisi yang berkaitan dengan keuangan daerah pada penyelenggaraan pemerintahan harus paham terkait arti dari keuangan daerah itu sendiri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa, "Keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suatu daerah".

Keuangan daerah adalah salah satu bentuk pengaturan dengan konsep pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, maka keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004 : 379) mengatakan bahwa :

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah digunakan untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari kedua pengertian di atas terkait keuangan daerah, dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah harus bisa dikelola dengan efisien oleh pemerintah daerah masing-masing. Dengan tujuan untuk menghindari resiko-resiko yang membuat kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terpenuhi dengan semestinya.

#### **4. Inspektorat Kabupaten/Kota**

Dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Untuk tingkat kementerian kita kenal adanya Irjen (Inspektoral Jendral), sebagai pengawas internal. Sedangkan pengawas eksternal adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedangkan di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat daerah.

Inspektorat daerah dipimpin oleh inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada gubernur atau bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah, diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atau bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan. Inspektorat daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, lalu kemudian perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati dibidang pengawasan. Inspektorat daerah pada dasarnya adalah instansi penting dalam bidang pengawasan internal, baik pengawasan keuangan maupun pengawasan pelaksanaan. Adapun kedudukan inspektorat kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 31 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupate/Kota. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa, "Inspektorat kabupaten/kota berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten/kota".

Sebagai pengawas internal, inspektorat daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (kepala daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap

kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral.

Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa inspektorat daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah:

- a. Alat dalam organisasi pemerintah daerah yang menjalankan fungsi *quality assurance*.
- b. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (kepala daerah) dalam organisasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- c. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas.
- d. Kegiatan pemeriksaan bersifat *pre-audit* atau *build-in* sepanjang proses kegiatan berlangsung.

Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 1 ayat 3 mendefinisikan Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka unsur pengawasan pada pemerintah daerah yang sebelumnya dilaksanakan oleh inspektur wilayah provinsi kabupaten/kota. Inspektorat merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **B. Deskripsi Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini, sesuai dengan judul yakni, "Pengawasan Inspektorat Daerah Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar", dimana pendekatan konsep yang dianggap relevan dengan fokus penelitian ini yakni sebagai berikut:

### **1. Objektif dan Komprehensif**

Objektif adalah pengawasan yang dilaksanakan secara benar-benar objek. Pengawasan keuangan yang dilaksanakan secara menyeluruh terhadap laporan keuangan dari berbagai organisasi pemerintah daerah. Komprehensif adalah data yang disajikan secara keseluruhan demi kelancarannya pelaporan keuangan.

## **2. Tepat Waktu**

Tepat waktu adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses pengawasan yang dijalankan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## **3. Akurat**

Akurat adalah data informasi yang didapat harus benar-benar dapat dipercaya dan handal sebagai data laporan keuangan.

## **4. Ekonomi Realistik**

Secara ekonomi realistik, pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekan seminimum mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna.

## **5. Fleksibel**

Harus dapat mengikuti perkembangan agar segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.

## **C. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori dan bahan kajian yang digunakan pada penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang terdiri dari beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis:



**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul Artikel</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Dessy Nindya Ningsih, 2017.	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pesawaran.	Deskriptif – Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada 3 (tiga) tahap dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pesawaran, yaitu tahap perencanaan pengawasan, tahap pelaksanaan pengawasan dan tahap penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan.</li> </ul>
2	Iis Priyatun, 2018	Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Deskriptif - Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan fisik belum dilaksanakan secara menyeluruh pada pemeriksaan kasus masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti.</li> </ul>

3	Defitri et al., 2018.	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akutansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Deskriptif - Kuantitatif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, sedangkan Sistem Akutansi Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</li> </ul>
---	-----------------------	--	---------------------------	--

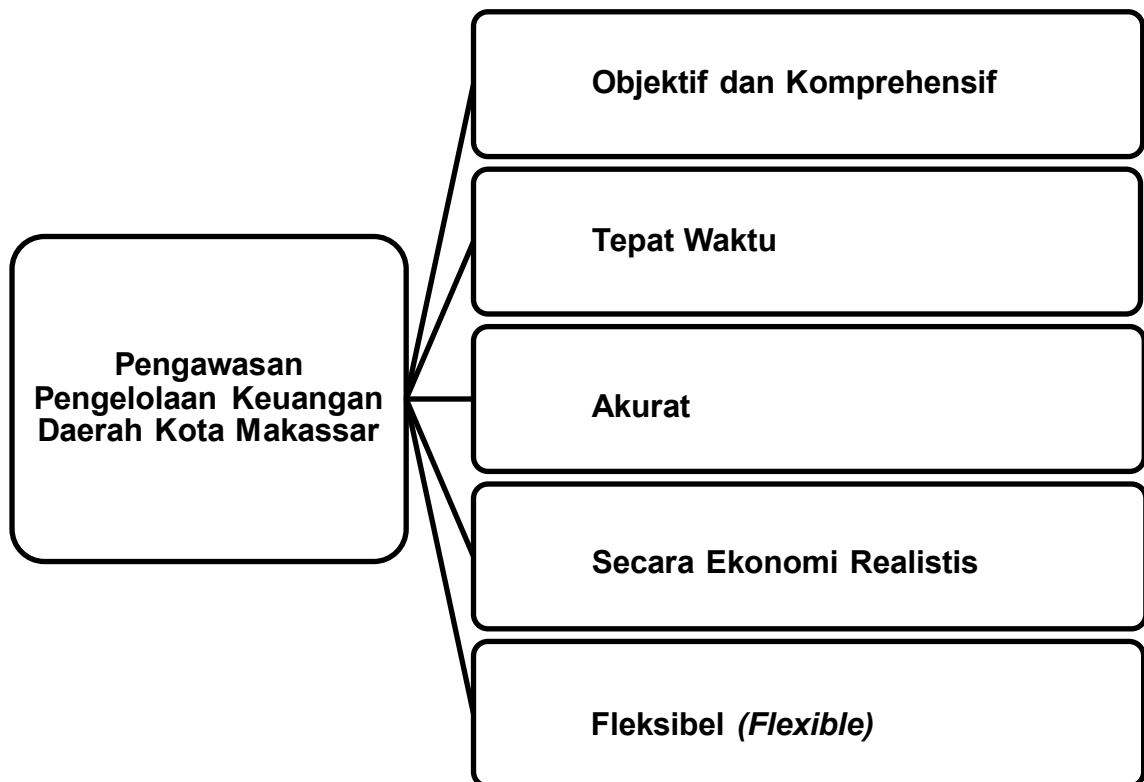
Sumber: Data Primer, 2022.

#### D. Kerangka Konsep

Pengawasan keuangan berkualitas, harus dilaksanakan secara objektif, tepat waktu dan akurat agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga pengelolaan keuangan daerah yang dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan harus dapat dipahami, dapat dibandingkan, dan agar bermanfaat dengan laporan keuangan lainnya pada jajaran Pemerintahan Daerah Kota Makassar

Berdasarkan uraian diatas, kerangka konsep pada penelitian ini disusun berdasarkan alur hubungan antara pengawasan pada pengelolaan keuangan pemerintah kota di Inspektorat Kota makassar, sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber : Menurut Siswanto (2009 : 149)